



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

**Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Sulawesi
Tengah**

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 25 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Sulawesi Tengah



MUHAMMAD DHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 25 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Sulawesi Tengah



MUHAMMAD KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.....	2
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD	3
BAB II	4
INFORMASI UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 PENDAHULUAN	4
2.2 VISI DAN MISI	5
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
BAB III.....	8
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	8
3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	8
3.1.1 Pendapatan	8
3.1.2 Belanja	8
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN.....	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	15
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	15
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN...	16
4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS AKUN NERACA	16
4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	27
4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN OPERASIONAL	30
4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP.....	32
BAB V	35

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....	35
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	35
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA.....	35
1. Retribusi Daerah-LRA.....	35
2. Lain-lain PAD yang Sah-LRA	35
5.1.2 Belanja Daerah	36
5.1.2.1 Belanja Operasi	37
5.1.2.2 Belanja Modal.....	48
5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA	51
5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA	52
5.2.1. Aset.....	52
5.2.1.1 Aset Lancar	53
5.2.1.2 Aset Tetap	56
5.2.1.3 Aset Lainnya	62
5.2.2. Kewajiban	63
5.2.3. Ekuitas	63
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	64
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	64
5.3.2 Beban	65
5.3.2.1 Beban Operasi.....	65
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO.....	70
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	70
5.4.1 Ekuitas Awal	71
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO.....	71
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan	71
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.....	72
5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	72
BAB VI PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	10
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	12
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	23
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	25
Tabel 5.1	Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	36
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	37
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	38
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	39
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	40
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	41
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	43
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024.....	44
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	45
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	47
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	49
Tabel 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	50

Tabel 5.13 Rincian Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.....	52
Tabel 5.14 Rincian Aset Lancar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	54
Tabel 5.15 Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2025.....	55
Tabel 5.16 Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	56
Tabel 5.17 Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap	58
Tabel 5.18 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	58
Tabel 5.19 Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	59
Tabel 5.20 Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025.....	60
Tabel 5.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.....	61
Tabel 5.22 Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.....	62
Tabel 5.23 Rincian Laporan Ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	64
Tabel 5.24 Rincian Beban Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	65
Tabel 5.25 Rincian Beban Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	67
Tabel 5.26 Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	68
Tabel 5.27 Rincian dan Perbandingan Beban Penyusutan Tahun 2025	69
Tabel 5.28 Rincian Laporan Ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025	71
Tabel 5.29 Rincian Mutasi Koreksi Ekuitas 2025	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	36
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	39
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa .	42
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal.....	49
Gambar 5.5	Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2025.....	53
Gambar 5.6	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025.....	57
Gambar 5.7	Komposisi Beban Operasi tahun 2025.....	66

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perpustakaan. Dengan kedudukan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Sebagai rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan memberikan arah penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : ***“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”***.

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bahan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di Bidang Perpustakaan serta sebagai bahan Evaluasi sampai sejauhmana realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahun Anggaran 2025.

Eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur No mor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi,

menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan memberikan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Potensi dari permasalahan pembangunan daerah pada umumnya adalah timbul dari adanya faktor internal maupun eksternal dimana kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan maupun tantangan yang tidak diantisipasi.

Kinerja pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode lima tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dicermati sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Identifikasi permasalahan urusan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu di perpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka.
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan di perpustakaan masih perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.
4. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional implementasi di daerah tentang kegiatan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia baik APBD maupun APBN dalam upaya peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pembinaan semua jenis perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas.
7. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal.
8. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang Perpustakaan (Pustakawan) dan Kearsipan (Arsiparis).

2.2 VISI DAN MISI

Visi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan suatu gagasan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang. Visi juga merupakan hal yang krusial bagi sebuah organisasi dalam menjamin keberlangsungan dan kesuksesan jangka

panjang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan perpustakaan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima”.

Selaras dengan visi yang telah dirumuskan diatas, maka misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Yang Representatif.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Dan Penggunaan Arsip Provinsi

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Terwujudnya Pelayanan Indeks Kepuasan Meningkatnya Standar Mengembangkan Layanan Perpustakaan Publik Yang Masyarakat Pelayanan Publik Digital Dan Prima.
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien Dan Transparan)

Sedangkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Yang Representatif.
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Perlindungan Penyelamatan, Dan Penggunaan Arsip Provinsi

Arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Mengembangkan Layanan Perpustakaan Digital Dan Pembudayaan Gemar Membaca
- b. Mengembangkan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyimpanan Perawatan Dan Pelestarian Naskah Kuno
- d. Melaksanakan Pengelolaan Arsip Dinamis Dan Statis.
- e. Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan.

Peta strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Meningkatnya Standar Pelayanan Publik.

- b. Meningkatkan Pelestarian Karya Cetak Dan Naskah Kuno Milik Daerah.
- c. Meningkatkan Pengelolaan Arsip Dan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan	9.200.000,00	1.000.000,00	10,87	8.200.000,00
Belanja	18.291.908.921,52	15.587.028.646,00	85,21	2.704.880.275,52
Surplus / (Defisit)	(18.282.708.921,52)	(15.586.028.646,00)	85,25	(2.696.680.275,52)

3.1.1 Pendapatan

Pada tahun 2025, jumlah realisasi anggaran pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000,00. Jumlah realisasi ini tidak melebihi jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.200.000,00. Artinya, pencapaian realisasi pendapatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencapai 10,87 persen. Jumlah pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah berupa Hasil Sewa BMD.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mengelola anggaran Belanja sebesar Rp18.291.908.921,52. Sehingga, masih terdapat sejumlah Rp2.704.880.275,52 sebagai sisa lebih anggaran Belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
BELANJA DAERAH	18.291.908.921,52	15.587.028.646,00	85,21	(2.704.880.275,52)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.361.784.827,52	13.815.308.643,00	84,44	(2.546.476.184,52)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.512.800,00	210.315.042,00	99,91	(197.758,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	176.626.400,00	176.438.532,00	99,89	(187.868,00)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.071.950,00	8.071.950,00	100,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	7.494.500,00	7.494.500,00	100,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.569.700,00	9.562.230,00	99,92	(7.470,00)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.750.250,00	8.747.830,00	99,97	(2.420,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.401.321.582,52	10.909.395.772,00	81,41	(2.491.925.810,52)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.140.121.582,52	10.648.255.772,00	81,04	(2.491.865.810,52)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	226.200.000,00	226.140.000,00	99,97	(60.000,00)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.250.000,00	134.250.000,00	100,00	0,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	0,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.685.000,00	31.676.500,00	99,97	(8.500,00)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.685.000,00	31.676.500,00	99,97	(8.500,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.269.165,00	310.457.953,00	99,74	(811.212,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.634.555,00	95.500.222,00	99,86	(134.333,00)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.881.060,00	61.439.610,00	99,29	(441.450,00)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.329.550,00	20.289.061,00	99,80	(40.489,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.424.000,00	133.229.060,00	99,85	(194.940,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.554.000,00	164.071.908,00	99,71	(482.092,00)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.554.000,00	164.071.908,00	99,71	(482.092,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.703.424.280,00	1.655.211.274,00	97,17	(48.213.006,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.209.280,00	362.464.474,00	97,38	(9.744.806,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.331.215.000,00	1.292.746.800,00	97,11	(38.468.200,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.768.000,00	399.930.194,00	98,80	(4.837.806,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.120.000,00	75.120.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.450.000,00	152.042.944,00	97,81	(3.407.056,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.140.000,00	43.997.250,00	99,68	(142.750,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.058.000,00	128.770.000,00	99,01	(1.288.000,00)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.371.863.571,00	1.275.324.042,00	92,96	(96.539.529,00)
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	443.047.121,00	393.754.685,00	88,87	(49.292.436,00)
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	32.087.100,00	32.063.500,00	99,93	(23.600,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	20.449.800,00	17.202.000,00	84,12	(3.247.800,00)
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	33.523.350,00	32.716.100,00	97,59	(807.250,00)
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	203.890.871,00	186.297.705,00	91,37	(17.593.166,00)
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	150.546.000,00	122.925.380,00	81,65	(27.620.620,00)
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	0,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	928.816.450,00	881.569.357,00	94,91	(47.247.093,00)
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	509.234.750,00	502.174.794,00	98,61	(7.059.956,00)
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	286.941.750,00	266.445.000,00	92,86	(20.496.750,00)
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	60.229.750,00	40.539.363,00	67,31	(19.690.387,00)
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	72.410.200,00	72.410.200,00	100,00	0,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	273.294.773,00	238.157.871,00	87,14	(35.136.902,00)
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	57.784.400,00	57.722.000,00	99,89	(62.400,00)
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	57.784.400,00	57.722.000,00	99,89	(62.400,00)
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	70.030.150,00	35.645.348,00	50,90	(34.384.802,00)
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	70.030.150,00	35.645.348,00	50,90	(34.384.802,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	145.480.223,00	144.790.523,00	99,53	(689.700,00)
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	117.681.200,00	117.501.500,00	99,85	(179.700,00)
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	27.799.023,00	27.289.023,00	98,17	(510.000,00)
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	230.302.550,00	210.561.150,00	91,43	(19.741.400,00)
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	165.852.550,00	148.370.150,00	89,46	(17.482.400,00)
Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	13.935.000,00	13.650.000,00	97,95	(285.000,00)
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	41.348.700,00	38.521.300,00	93,16	(2.827.400,00)
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	110.568.850,00	96.198.850,00	87,00	(14.370.000,00)
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	20.460.000,00	18.522.000,00	90,53	(1.938.000,00)
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	17.760.000,00	15.822.000,00	89,09	(1.938.000,00)
Akuisisi Arsip Statis	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	43.990.000,00	43.669.000,00	99,27	(321.000,00)
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	20.820.000,00	20.499.000,00	98,46	(321.000,00)
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	23.170.000,00	23.170.000,00	100,00	0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	54.663.200,00	51.156.940,00	93,59	(3.506.260,00)
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	3.953.200,00	3.215.000,00	81,33	(738.200,00)
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3.953.200,00	3.215.000,00	81,33	(738.200,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	6.960.000,00	6.840.000,00	98,28	(120.000,00)
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	6.960.000,00	6.840.000,00	98,28	(120.000,00)
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	0,00
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	0,00
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	19.400.000,00	17.463.960,00	90,02	(1.936.040,00)
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	16.700.000,00	14.763.960,00	88,41	(1.936.040,00)
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	15.550.000,00	14.837.980,00	95,42	(712.020,00)
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	8.350.000,00	7.637.980,00	91,47	(712.020,00)
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	18.291.908.921,52	15.590.508.646,00	85,21	(2.704.880.275,52)

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 masih banyak mengalami hambatan/kendala dalam pelaksanaan programnya, adapun hambatan serta tantangan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Kualitas dari kemampuan SDM profesional di bidang perpustakaan maupun di bidang kearsipan yang belum optimal;

2. Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan maupun pengarsipan yang masih terbatas;
3. Masih lemahnya kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan maupun kearsipan;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini..

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS AKUN NERACA

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 - c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
- e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan

4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- b. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika :
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode

pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 3. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging *schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal

pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

1. Koreksi Kesalahan
 - a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
 - b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
 - c. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode

sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- d. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- f. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- h. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- i. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- j. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

- k. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- l. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- m. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah-LRA	1.000.000,00	1.750.000,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 Hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	1.000.000,00	1.750.000,00

Pendapatan asli daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Terealisasi sebesar Rp1.000.000,00, atau 10,87 persen dari jumlah yang anggaran sebesar Rp9.200.000,00. Pendapatan asli daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp750.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.750.000,00. Pendapatan asli daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 hanya berasal dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Retribusi Daerah-LRA	0,00	0,00

Retribusi Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Retribusi daerah tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang juga tidak terealisasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Lain-lain PAD yang Sah-LRA	1.000.000,00	1.750.000,00

Lain-lain PAD yang Sah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Terealisasi sebesar Rp1.000.000,00, atau 23,81 persen dari jumlah yang anggaran sebesar Rp4.200.000,00. Lain-lain PAD yang Sah Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp750.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.750.000,00. Lain-lain PAD yang Sah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berupa Hasil Sewa BMD.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	15.587.028.646,00	23.457.910.451,87

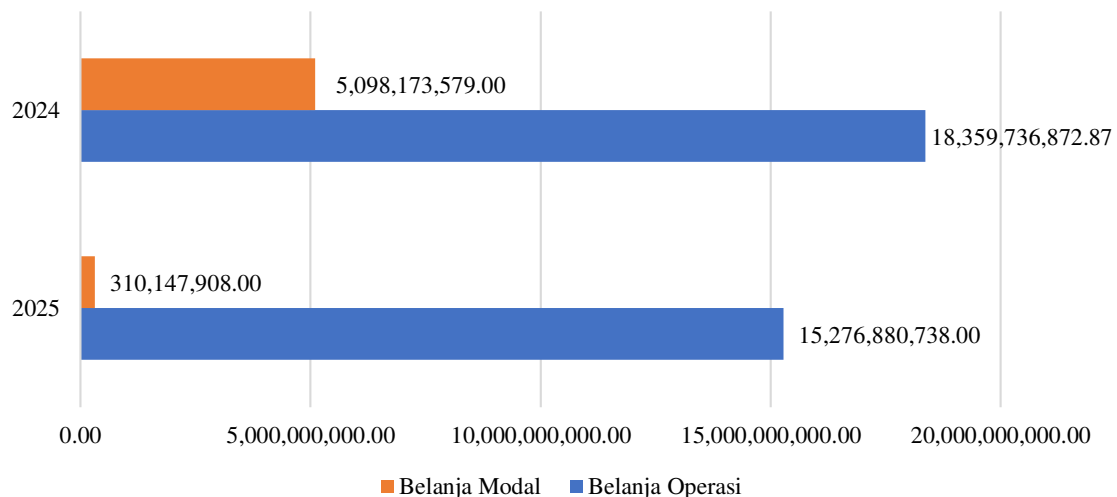
Realisasi anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp15.587.028.646,00 atau 85,21 persen dari anggaran belanja yang disajikan sebesar Rp18.291.908.921,52. Jumlah realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 33,55 persen atau sebesar Rp7.870.881.805,87 dari nilai realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp23.457.910.451,87. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025:

Tabel 5.1
Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Tahun 2025
		Rp	%	
Belanja Operasi	17.981.123.721,52	15.276.880.738,00	84,96	(2.704.242.983,52)
Belanja Modal	310.785.200,00	310.147.908,00	99,79	(637.292,00)
Jumlah	18.291.908.921,52	15.587.028.646,00	85,21	(2.704.880.275,52)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp15.276.880.738,00 atau 84,96 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.981.123.721,52. Artinya, terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp2.704.242.983,52. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp310.147.908,00 atau 99,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp310.785.200,00. Terdapat sisa anggaran Belanja Modal yang tidak digunakan sebesar Rp637.292,00. Pada Gambar di bawah dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2025 dan tahun 2024:

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	15.276.880.738,00	18.359.736.872,87

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp15.276.880.738,00 atau 84,96 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp17.981.123.721,52. Artinya terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp2.704.242.983,52. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 16,79 persen atau sebesar Rp3.082.856.134,87 dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian realisasi dari Belanja Operasi tahun 2025:

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	13.140.121.582,52	10.648.255.772,00	81,04	(2.491.865.810,52)
Belanja Barang dan Jasa	4.841.002.139,00	4.628.624.966,00	95,61	(212.377.173,00)
Jumlah	17.981.123.721,52	15.276.880.738,00	84,96	(2.704.242.983,52)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Operasi tahun 2025 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp10.648.255.772,00 yang terealisasi sebesar 81,04 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.140.121.582,52. Artinya terdapat sisa anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.491.865.810,52. Selain itu, realisasi Belanja Barang

dan Jasa di tahun 2025 sebesar Rp4.628.624.966,00 atau 95,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.841.002.139,00. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp212.337.173,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai	10.648.255.772,00	10.408.809.917,00

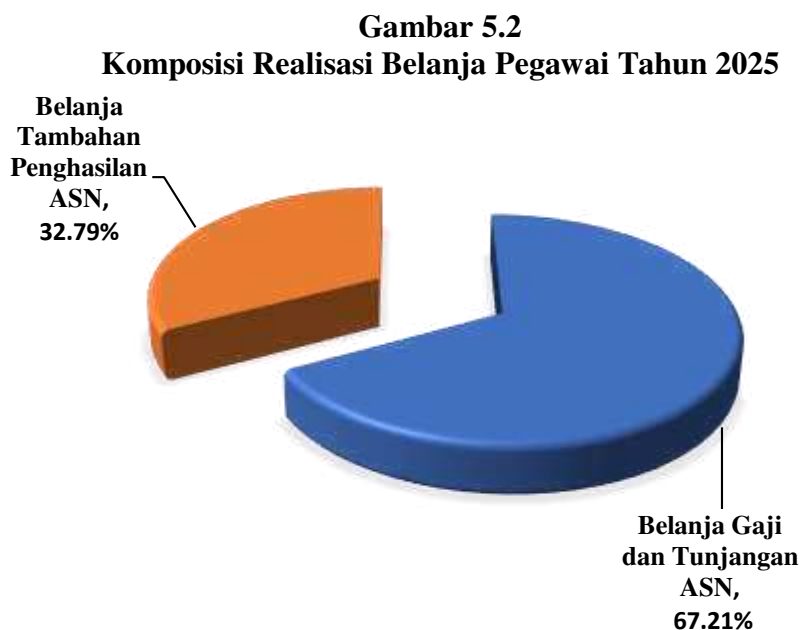
Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp10.648.255.772,00 atau 81,04 persen dari total anggaran sebesar Rp13.140.121.582,52. Realisasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan 2,30 persen atau sebesar Rp239.445.855,00 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 10.408.809.917,00. Belanja Pegawai pada tahun 2025 terdiri dari beberapa item belanja, berikut disajikan tabel rincian anggaran dan realisasi dari masing-masing item di dalam Belanja Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 :

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.373.048.518,19	7.156.295.772,00	85,47	(1.216.752.746,19)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.767.073.064,33	3.491.960.000,00	73,25	(1.275.113.064,33)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	13.140.121.582,52	10.648.255.772,00	81,04	(2.491.865.810,52)

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai terdiri dari 3 kelompok, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Jenis belanja dengan realisasi tertinggi adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yakni 85,47 persen atau sebesar Rp7.156.295.772,00 dari anggaran sebanyak Rp8.373.048.518,19 dan belanja dengan tingkat realisasi terendah adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yakni 0,00 persen. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Pegawai tahun 2025.



Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa Kontribusi belanja tertinggi terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan kontribusi sebesar 67,21 persen, sedangkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN memiliki kontribusi sebesar 32,79 persen.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar 85,47 persen atau sebesar Rp7.156.295.772,00 dari anggaran sebesar Rp8.373.048.518,19 sehingga masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp1.216.752.746,19. Berikut rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji Pokok ASN	6.311.987.279,16	5.791.993.389,00	91,76	(519.993.890,16)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	710.396.121,38	487.091.124,00	68,57	(223.304.997,38)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	325.305.391,50	170.100.000,00	52,29	(155.205.391,50)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	357.316.626,75	233.980.000,00	65,48	(123.336.626,75)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	208.436.803,00	180.939.996,00	86,81	(27.496.807,00)
Belanja Tunjangan Beras ASN	430.229.539,50	277.380.670,00	64,47	(152.848.869,50)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.799.386,56	14.733.263,00	51,16	(14.066.123,56)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	577.370,34	77.330,00	13,39	(500.040,34)
Jumlah	8.373.048.518,19	7.156.295.772,00	85,47	(1.216.752.746,19)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Gaji Pokok ASN menjadi kelompok belanja dengan tingkat realisasi tertinggi dalam Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yakni sebesar 91,76 persen atau Rp5.791.993.389,00 dari anggaran sebesar Rp6.311.987.279,16 Sedangkan Belanja Pembulatan Gaji PNS menjadi kelompok belanja terendah dalam Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yakni sebesar 13,39 persen atau sebesar Rp77.330,00 dari anggaran Rp577.370,34.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terealisasi sebesar Rp3.491.960.000,00 atau 73,25 persen dari anggaran nya sebesar RP4.767.073.064,33. Berikut rincian Belanja Tambahan Penghasil ASN.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.938.321.162,83	1.466.708.500,00	75,67	(471.612.662,83)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.828.259.901,50	2.025.251.500,00	71,61	(803.008.401,50)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	492.000,00	0,00	0,00	(492.000,00)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Jumlah	4.767.073.064,33	3.491.960.000,00	73,25	(1.275.113.064,33)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN menjadi belanja dengan tingkat realisasi tertinggi dengan realisasi sebesar Rp1.466.708.500,00 atau 75,67 persen dari anggarannya sebesar Rp1.938.321.162,83, untuk Tambahan Penghasil Berdasarkan Prestasi Kerja ASN terealisasi Sebesar Rp2.025.251.500,00 atau 71,61 persen dari anggarannya sebesar Rp2.828.259.901,50, dan untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN menjadi tingkat realisasi terendah yakni tidak terealisasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	4.628.624.966,00	7.950.926.955,87

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2025 sebesar Rp4.628.624.966,00 atau 95,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.841.002.139,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan tahun 2025 sebesar Rp212.377.173,00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 41,79 persen atau sebesar Rp3.322.301.989,87 dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024.

Secara umum, realisasi belanja Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam rangka efisiensi, penyesuaian arah kebijakan, serta kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan. Kebijakan tersebut ditandai dengan pengetatan belanja, khususnya perjalanan dinas, serta pembatasan dan penundaan kegiatan yang belum prioritas sebagaimana diatur dalam edaran Gubernur. Kondisi ini mencerminkan penyesuaian belanja sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi yang diterapkan. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 :

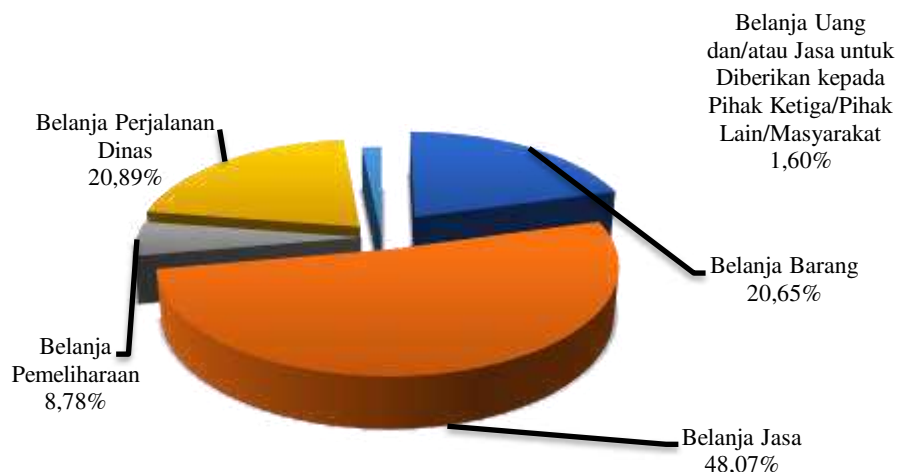
Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2025Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	970.087.859,00	955.902.945,00	98,54	(14.184.914,00)

Tahun 2025Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa	2.455.929.280,00	2.387.928.817,00	97,23	(68.000.463,00)
Belanja Pemeliharaan	244.448.000,00	243.732.751,00	99,71	(715.249,00)
Belanja Perjalanan Dinas	1.096.537.000,00	967.060.453,00	88,19	(129.476.547,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.841.002.139,00	4.628.624.966,00	95,61	(212.377.173,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat lima jenis dalam rincian anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2025. Jenis belanja dengan tingkat realisasi tertinggi adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp74.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi terendah adalah Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar Rp967.060.453,00 atau 88,19 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp1.096.537.000,00. Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Barang dan Jasa :

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa



Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa komposisi realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Belanja Jasa sebesar 48,07 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok Belanja Barang dan Jasa, sedangkan komposisi realisasi anggaran

terendah terdapat pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 1,60 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok Barang dan Jasa.

Belanja Barang di tahun 2024 hanya terealisasi dari Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp955.902.945,00 atau 98,54 persen dari total anggaran sebesar Rp970.087.859,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.184.914,00. Berikut rincian Belanja Barang Pakai Habis:

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.097.100,00	107.073.500,00	99,98	(23.600,00)
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.881.375,00	1.880.513,00	99,95	(862,00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236.369.215,00	232.379.412,00	98,31	(3.989.803,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.328.000,00	49.527.635,00	98,41	(800.365,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.378.420,00	38.855.310,00	98,67	(523.110,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.866.820,00	14.136.000,00	89,09	(1.730.820,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.399.700,00	49.012.994,00	97,25	(1.386.706,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	105.000,00	0,00	0,00	(105.000,00)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	58.607.671,00	58.381.005,00	99,61	(226.666,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.487.500,00	12.486.078,00	99,99	(1.422,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.460.860,00	7.290.430,00	69,69	(3.170.430,00)
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	197.848,00	197.848,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	266.975.000,00	265.001.700,00	99,26	(1.973.300,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.075.000,00	2.073.600,00	99,93	(1.400,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	93.645.000,00	93.421.920,00	99,76	(223.080,00)
Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.413.350,00	14.385.000,00	99,80	(28.350,00)
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	970.087.859,00	955.902.945,00	98,54	(14.184.914,00)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa item Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada rincian Belanja Barang Habis Pakai yakni Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata dengan tingkat realisasi sebesar 100 persen dari masing-masing anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah adalah Belanja Pakaian Olahraga, Belanja Untuk Kegiatan kantor-Perabot Kantor, dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium karena tidak terealisasi .

Realisasi Belanja Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.387.928.817,00 atau 97,23 persen dari total anggaran sebesar Rp2.455.929.280,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp230.800.463,00. Berikut rincian Belanja Jasa:

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa Kantor	2.279.979.280,00	2.213.320.817,00	97,08	(66.658.463,00)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.150.000,00	11.808.000,00	97,19	(342.000,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	63.800.000,00	63.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	(1.000.000,00)
Jumlah	2.455.929.280,00	2.387.928.817,00	97,23	(68.000.463,00)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa item Belanja Jasa Terdiri dari Belanja Jasa Kantor yang terealisasi Sebesar Rp2.213.320.817,00 atau 97,08 persen, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang terealisasi sebesar Rp11.808.000,00 atau 97,19 persen, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp63.800.000,00 atau 100,00 persen dan Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi yang terealisasi sebesar Rp99.000.000,00 atau 99,00. Sedangkan untuk Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tidak terealisasi.

Belanja Jasa Kantor untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terealisasi Sebesar Rp2.213.320.817,00 atau 97,08 persen dari anggarannya sebesar Rp2.279.979.280,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp66.658.463,00. Berikut rincian Belanja Jasa Kantor :

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	133.100.000,00	132.000.000,00	99,17	(1.100.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.150.700.000,00	1.113.187.500,00	96,74	(37.512.500,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	151.690.000,00	151.200.000,00	99,68	(490.000,00)
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.150.000,00	13.300.000,00	62,88	(7.850.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	22.250.000,00	16.000.000,00	71,91	(6.250.000,00)
Belanja Tagihan Listrik	316.409.280,00	314.863.376,00	99,51	(1.545.904,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	8.020.000,00	95,48	(380.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.800.000,00	47.601.098,00	85,31	(8.198.902,00)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.400.000,00	16.191.243,00	83,46	(3.208.757,00)
Belanja Lembur	4.680.000,00	4.617.600,00	98,67	(62.400,00)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	207.120.000,00	207.060.000,00	99,97	(60.000,00)
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	10.920.000,00	10.920.000,00	100,00	0,00
Jumlah	2.279.979.280,00	2.213.320.817,00	1.592,78	(66.658.463,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Jasa adalah Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi, dan Belanja Jasa Pengolahan Sampah dengan tingkat realisasi sebesar 100,00 persen, sedangkan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

Tim Pelaksana Kegiatan menjadi kelompok belanja dengan tingkat realisasi terendah karena tidak terealisasi.

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN yang terealisasi sebesar Rp11.808.000,00 atau 97,19 persen dari anggarannya sebesar Rp12.150.000,00. Untuk Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp63.800.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya. Untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang terealisasi sebesar Rp99.000.000,00 atau 99,00 persen dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp213.962.751,00 atau 99,80 persen dari total anggaran sebesar Rp214.390.000,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp427.249,00, dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mencakup Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor yang terealisasi Rp29.770.000,00 atau 99,04 persen dari total anggarannya sebesar Rp30.058.000,00 Berikut rincian Belanja Pemeliharaan :

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	115.050.000,00	114.856.182,00	99,83	(193.818,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.000.000,00	20.995.519,00	99,98	(4.481,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	27.750.000,00	27.747.960,00	99,99	(2.040,00)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	27.300.000,00	27.213.800,00	99,68	(86.200,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	9.490.000,00	9.422.790,00	99,29	(67.210,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	13.726.500,00	99,47	(73.500,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	30.058.000,00	29.770.000,00	99,04	(288.000,00)
Jumlah	244.448.000	243.732.751	91,35	(715.249,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan tingkat realisasi sebesar Rp27.747.960,00 atau 99,99 persen dari anggarannya sebesar Rp27.750.000,00 sedangkan belanja dengan tingkat realisasi terendah adalah Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin karena tidak terealisasi.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mencakup Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang terealisasi sebesar Rp895.990.453,00 atau 87,67 persen dari anggarannya sebesar Rp1.021.987.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang terealisasi sebesar 74.550.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya.

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mencakup Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan yang terealisasi Rp74.000.000,00 atau 100,00 persen dari total anggarannya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	310.147.908,00	5.098.173.579,00

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, Peralatan dan Mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta Aset Tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp310.147.908,00 atau 99,79 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp310.785.200,00 Artinya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp637.292,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp4.788.025.671,00 dibandingkan nilai Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp5.098.173.579,00.

Kelompok Belanja Modal pada tahun 2025 hanya terdiri dari dua jenis belanja yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Rincian Anggaran realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut:

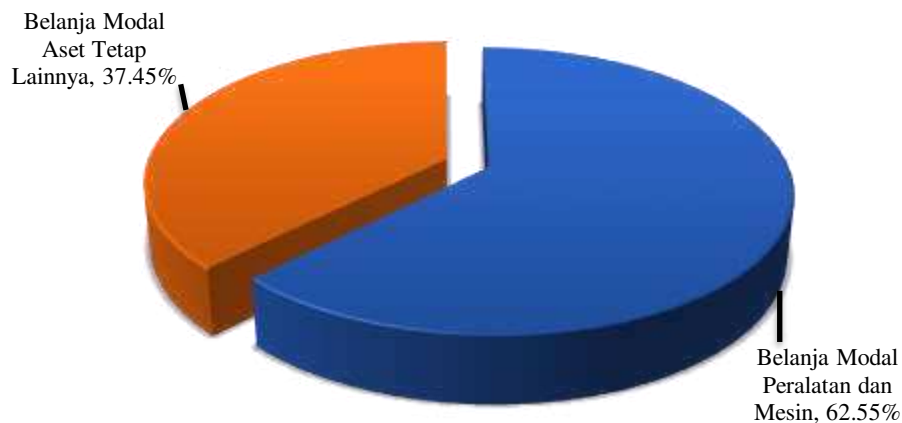
Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.554.000,00	193.986.408,00	99,71	(567.592,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.231.200,00	116.161.500,00	99,94	(69.700,00)
Jumlah	310.785.200,00	310.147.908,00	99,79	(637.292,00)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal tertinggi tahun 2025 adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp116.161.500,00 atau 99,94 persen dari total anggarannya. Sementara nilai realisasi belanja terendah adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.986.408,00 atau 99,71 persen dari anggarannya sebesar Rp194.554.000,00.

Secara keseluruhan bila dilihat komposisi penyerapan anggaran Belanja Modal, realisasi terbesar adalah persen dari jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sedangkan komposisi realisasi terendah adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 21,14 persen dari jumlah realisasi Belanja Modal. Berikut gambar dari komposisi Belanja Modal untuk tahun 2025.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.986.408,00	1.077.880.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2025 sebesar Rp193.986.408,00 atau 99,71 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp194.554.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp567.592,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar 82,00 persen atau sebesar Rp883.893.592,00 dari nilai realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.077.880.000,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025:

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Mebel	98.820.000,00	98.601.000,00	99,78	(219.000,00)
Belanja Modal Alat Pendingin	8.750.000,00	8.749.908,00	99,99	(92,00)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.000.000,00	59.829.000,00	99,72	(171.000,00)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Personal Computer	26.984.000,00	26.806.500,00	99,34	(177.500,00)
Jumlah	194.554.000,00	193.986.408,00	99,71	(567.592,00)

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp8.749.908,00 atau 99,99 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Modal adalah Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp26.806.500,00 atau 99,34 persen dari anggarannya sebesar Rp26.984.000,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	3.673.493.579,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 tidak terealisasi sehingga nilai tersebut membuat nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurun sebesar. Rp3.673.493.579,00 dibandingkan dengan nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.161.500,00	346.800.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp116.161.500,00 atau 99,94 persen dari total anggarannya sebesar Rp116.161.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp69.700,00. Nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 66,50 persen atau sebesar Rp230.638.500,00 dibandingkan dengan nilai tahun 2024. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya hanya berasal dari Belanja Modal Buku Umum.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA	(15.586.028.646,00)	(23.456.160.451,87)

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan Selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025

mengalami defisit sebesar Rp15.586.028.646,00 atau 85,25 persen dari yang telah dianggarkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami Penurunan defisit di tahun 2025 sebesar 33,55 atau sebesar Rp7.870.131.805,87 bila dibandingkan dengan nilai defisit tahun 2024 sebesar Rp23.456.160.451,87.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut penjelasan terkait akun-akun neraca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1. Aset	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.808.718.687,46 Terjadi penurunan sebesar Rp 804.339.959,00 atau 0,02 persen dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.613.058.646,46. Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, tabel berikut menunjukkan rinciannya:

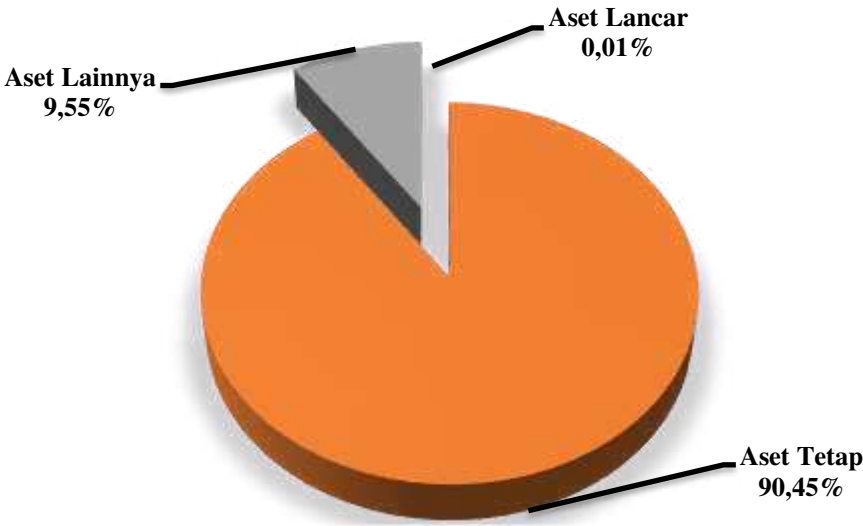
Tabel 5.13
Rincian Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	2.652.627,00	2.625.246,00	(27.381,00)	(1,04)
Aset Tetap	29.674.460.674,46	30.478.828.014,46	804.367.340,00	2,64
Aset Lainnya	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00	0,00	0,00
Jumlah	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46	804.339.959,00	2,39

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 berasal dari Aset Lancar sebesar Rp2.652.627,00, Aset Tetap sebesar Rp29.552.612.941,36 serta Aset Lainnya sebesar Rp3.131.605.386,00. Nilai Aset Lancar mengalami kenaikan nilai sebesar 1,04 persen atau

sebesar Rp27.381,00, nilai Aset Tetap mengalami penurunan sebesar 2,64 persen atau sebesar Rp804.367.340,00 dan Aset Lainnya tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2025:

Gambar 5.5
Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2025



Gambar di atas menunjukkan bahwa Aset Tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 90,45 persen. Sedangkan Aset Lainnya memberikan kontribusi dengan presentase hanya 9,55 persen, dan Aset Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase 0,01 persen dari total aset yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	2.652.627,00	2.625.246,00

Aset Lancar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp2.652.627,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen atau sebesar Rp 27.381,00 dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp2.625.246,00. Aset Lancar per 31 Desember 2025 hanya terdiri dari saldo persediaan. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 :

Tabel 5.14
Rincian Aset Lancar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Persediaan	2.652.627,00	2.625.246,00	27.381,00
Jumlah	2.652.627,00	2.625.246,00	27.381,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025, sesuai dengan *Register STBP* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2025 sehingga nilai Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025.

Sisa saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah per 31

Desember 2025 sebesar Rp0,00, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah berdasarkan STS nomor 72.00/06.0/000002/UPNIHIL/2.23.2.24.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 per 31 Desember 2025 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Persediaan	2.652.627,00	2.625.246,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (Stock Opname) nomor 000.2.3.1/1920/DISPUSAKA, jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp2.652.627,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen atau sebesar Rp27.381,00 dibandingkan dengan nilai akhir persediaan tahun lalu sebesar Rp2.605.500,00.

Tabel 5.15
Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.904.461,00	1.994.800,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	748.166,00	630.446,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00
Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bahan Komputer)	0,00	0,00
Jumlah	2.652.627,00	2.625.246,00

Berdasarkan tabel diatas, nilai persediaan akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.652.627,00 nilai persediaan akhir tersebut terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.904.461,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp90.339,00 dibandingkan nilai akhir persediaan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.994.800,00, untuk Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) sebesar

Rp748.166,00 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp117.720,00 dibandingkan nilai tahun sebelumnya. Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya, Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bahan Komputer) sebesar Rp0,00 nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan nilai tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00penurunan. Secara keseluruhan, nilai persediaan akhir per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.381,00 bila dibandingkan dengan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.625.246,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	29.674.460.674,46	30.478.828.014,466

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp29.674.460.674,46 nilai tersebut berasal dari nilai perolehan per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.666.639.992,46 lalu dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp16.992.179.318,00 Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.114.515.248,00 dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.478.828.014,46 Berikut rincian Aset Tetap berdasarkan nilai perolehan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

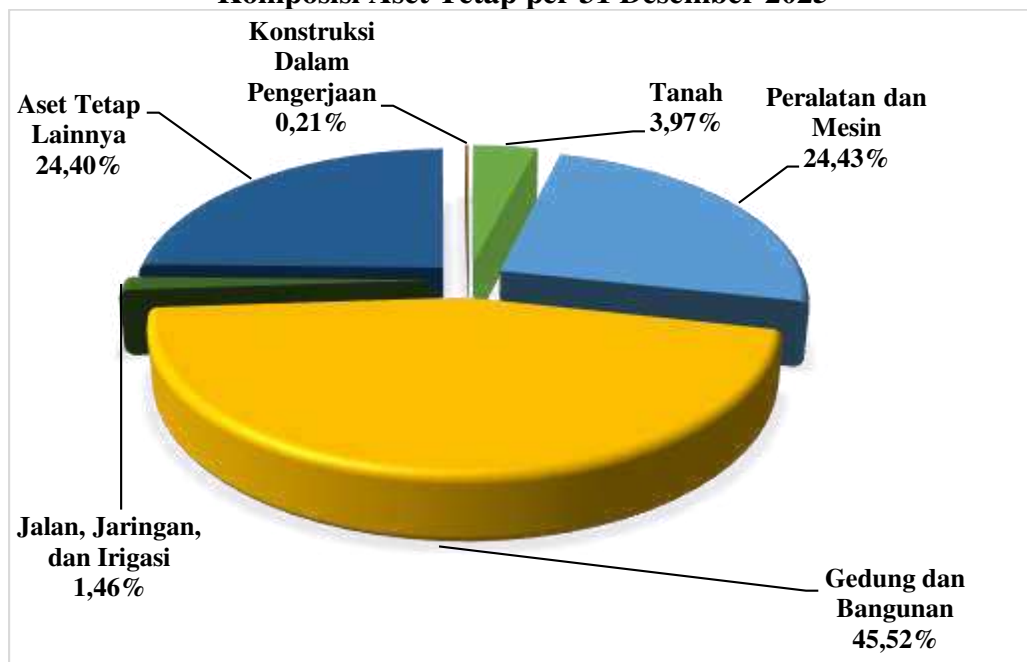
Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	1.852.450.000,00	1.852.450.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	11.401.973.854,00	11.207.987.446,00	193.986.408,00
Gedung dan Bangunan	21.244.720.344,62	21.244.720.344,62	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	682.270.100,00	682.270.100,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	11.385.291.693,84	11.269.130.193,84	116.161.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.934.000,00	99.934.000,00	0,00
Jumlah Harga Perolehan	46.666.639.992,46	46.356.492.084,46	310.147.908,00

Tabel di atas menunjukkan jumlah nilai Aset Tetap berdasarkan nilai perolehan atau sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai perolehan Aset Tetap mengalami kenaikan nilai sebesar Rp310.147.908,00 dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yakni sebesar Rp46.666.639.992,46. Tanah tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan nilai tahun lalu, Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp193.986.408,00 dari realisasi Belanja Modal dari nilai tahun sebelumnya sebesar Rp11.207.987.446,00, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2024, serta Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp116.161.500,00 dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp11.269.130.193,84.

Dalam komposisi Aset Tetap, yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan nilai Aset Tetap adalah Gedung dan Bangunan sebesar 45,52 persen sementara jenis Aset Tetap dengan kontribusi terkecil yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,21 persen. Berikut disajikan kontribusi jenis Aset Tetap terhadap total Aset Tetap tahun 2025

Gambar 5.6
Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025



Selain Aset Tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2025, terdapat Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel. Berdasarkan tabel di bawah, pada tahun 2024 barang ekstrakomptabel

tidak mengalami perubahan dengan nilai barang ekstrakomptabel tahun 2023. Rincian barang ekstrakomptabel terlampir pada lampiran barang ekstrakomptabel. Berikut Rincian Barang Ekstrakomptabel.

Tabel 5.17
Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstra s/d 2024	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2025
		Debit	Kredit	
Peralatan dan Mesin	71.411.000,00	0,00	0,00	71.411.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	71.411.000,00	0,00	0,00	71.411.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Tanah	1.852.450.000,00	1.852.450.000,00

Tanah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp1.852.450.000,00. Nilai tersebut sama dengan nilai tanah yang disajikan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi tanah tahun 2025. Tanah yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 terdiri dari tanah bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Jl. Banteng No. 6 Palu dengan luas 7.865,00 m² dan berlokasi di Jl. Karajalembah Kota Palu dengan luas 1.863,00 m².

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	11.401.973.854,00	11.207.987.446,00

Peralatan dan Mesin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp11.401.973.854,00. Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp193.986.408,00 atau 1,73 persen dari nilai Peralatan dan Mesin tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp11.207.987.446,00. Berikut disajikan tabel rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama tahun 2025.

Tabel 5.18
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	11.207.987.446,00

Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	193.986.408,00
Hibah	0,00
Jumlah Mutasi Bertambah	193.986.408,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Jumlah Mutasi	193.986.408,00
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	11.401.973.854,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kenaikan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya mutasi bertambah dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.986.408,00, nilai tersebut berasal dari Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp193.986.408,00, dan Belanja Modal Komputer sebesar Rp193.986.408,00. Berikut rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2025.

Tabel 5.19
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	2024	2025	Lebih/(Kurang)
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.742.255.602,00	3.742.255.602,00	0,00
Alat Pertanian	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	5.151.016.386,00	5.318.196.294,30	167.179.908,30
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	162.944.250,00	162.944.250,00	0,00
Alat Laboratorium	4.392.000,00	4.392.000,00	0,00
Alat Persenjataan	68.320.000,00	68.320.000,00	0,00
Alat Eksplorasi	2.014.459.208,00	2.041.265.708,00	26.806.500,00
Jumlah	11.207.987.446,00	11.401.973.854,30	193.986.408,30

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	21.244.720.344,62	21.244.720.344,62

Gedung dan Bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp21.244.720.344,62. Nilai Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Nilai Gedung dan Bangunan tahun 2024. Gedung dan Bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Bangunan Gedung Kantor.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	682.270.100,00	682.270.100,00

Jumlah Aset Tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp682.270.100,00. Nilai tersebut sama dengan nilai Aset Tetap – jalan, jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2024. Aset Tetap – Jalan, Jaringan Dan Irigasi per 31 Desember 2025 terdiri dari jalan lingkungan/halaman yang berlokasi di Jl. Banteng No. 6 dengan luas 600 m², selain itu terdapat juga jalan lingkungan/halaman yang berlokasi di Jl. Karajalembah dengan luas 640 m², serta terdapat instalasi gardu listrik distribusi lain-lain yang berlokasi di Jl. Banteng No. 6. Berikut rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Tabel 5.20
Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

Uraian	Lokasi	Nilai
Jalan Lingkungan/Halaman	Jl. Banteng No. 6	283.966.000,00
Jalan Lingkungan/Halaman	Jl. Karajalembah	20.100.000,00
Gardu Listrik	Jl. Banteng No. 6	378.204.100,00
Jumlah		682.270.100,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	11.385.291.693,84	11.269.130.193,844

Aset Tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah Aset Tetap lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2025 disajikan sebesar Rp11.385.291.693,84. Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen atau sebesar Rp116.161.500,00 dibandingkan dengan nilai 31 Desember 2024 sebesar Rp11.269.130.193,84. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Buku Umum.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.934.000,00	99.934.000,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp99.934.000,00, Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut berasal dari kapitalisasi aset untuk gedung dan bangunan ditahun sebelumnya tetapi proses pengerjaan yang belum selesai sehingga nilai tersebut dimunculkan sejak tahun sebelumnya. Nilai konstruksi Dalam Pengerjaan tidak mengalami perubahan dibandingkan nilai tahun sebelumnya . Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(17.114.027.051,10)	(15.877.664.070,00)

Nilai akumulasi penyusutan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp17.114.027.051,10 dan nilai akumulasi penyusutan yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.877.664.070,00. Artinya, terdapat kenaikan sebesar 6,81 persen atau sebesar Rp1.236.362.981,10. Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025.

Tabel 5.21
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025
Peralatan dan Mesin	9.267.092.259,00	26.898.667,00	606.859.346,00	9.900.850.272,00
Gedung dan Bangunan	6.222.499.465,00	116.161.500,00	328.578.704,00	6.667.239.669,00

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	388.072.346,00	0,00	36.017.031,00	424.089.377,00
Jumlah	15.877.664.070,00	143.060.167,00	971.455.081,00	16.992.179.318,00

Berdasarkan akumulasi penyusutan di tahun 2025 akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 senilai Rp16.992.179.318,00 diperoleh dari nilai akumulasi penyusutan 2024 sebesar Rp15.877.664.070,00, ditambah dengan pengakuan beban penyusutan sebesar Rp971.455.081,00 kemudian dikurangi dengan koreksi akumulasi sebesar Rp143.060.167,00. Rincian atas perubahan tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Tabel 5.22
Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Buku per 31 Desember 2025
Tanah	1.852.450.000,00	0,00	1.852.450.000,00
Peralatan dan Mesin	11.401.973.854,00	(9.900.850.272,00)	1.501.123.582,00
Gedung dan Bangunan	21.244.720.344,62	(6.551.078.169,00)	14.693.642.175,62
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	682.270.100,00	(424.089.377,00)	258.180.723,00
Aset Tetap Lainnya	11.385.291.693,84	(116.161.500,00)	11.269.130.193,84
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.934.000,00	0,00	99.934.000,00
Jumlah	46.666.639.992,46	(16.992.179.318,00)	29.674.460.674,46

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai buku Aset Tetap sebesar Rp29.674.460.674,46 dengan rincian nilai buku Tanah sebesar Rp1.852.450.000,00, Peralatan dan Mesin Rp1.501.123.582,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.693.642.175,62, Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp258.180.723,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.269.130.193,84, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp99.934.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.131.605.386,00. Nilai Aset Lainnya tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya tahun 2024. Berikut Pembentukan nilai Aset Lainnya Tahun 2025.

Uraian	2024	2025	Bertambah/(Berkurang)
Aset Lain-lain	5.444.721.900,00	4.398.121.900,00	(1.046.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.313.116.514,00)	(1.266.516.514,00)	1.046.600.000,00
Jumlah	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00	0,00

Berdasarkan Tabel diatas nilai Aset Lain-lain dan akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami Penurunan sebesar Rp1.046.600.000,00 yang berasal dari Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 tidak memiliki kewajiban. Artinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah membayar seluruh transaksi pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 maupun pembayaran gaji tahun 2025 pada tahun yang sama. Sehingga, per 31 Desember 2025 nilai kewajiban disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.3. Ekuitas	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah

terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp32.808.718.687,46 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.613.058.646,46. Artinya, terdapat penurunan sebesar 2,76 persen atau sebesar Rp 804.339.959,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2025.

Tabel 5.23
Rincian Laporan Ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	33.613.058.646,46	29.545.661.666,84
Surplus/Defisit – LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(26.898.667,00)	(498.130.716,38)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	15.586.028.646,00	23.456.160.451,87
Ekuitas Akhir	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	1.000.000,00	491.212.750,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.000.000,00 Pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengalami Penurunan sebesar 99,80 persen atau sebesar Rp490.212.750,00 dibandingkan nilai pendapatan di tahun 2024, yaitu sebesar Rp491.212.750,00

Nilai pada pendapatan – LO dapat berbeda dengan nilai pada pendapatan – LRA. Hal tersebut dikarenakan perbedaan basis pencatatan atau perbedaan metode pengakuan pendapatan. Pada tahun 2025, nilai pendapatan – LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berbeda dengan nilai pendapatan – LRA. Artinya, seluruh pendapatan yang telah diakui diawal oleh Pendapatan – LO diterima dalam bentuk kas secara keseluruhan dalam Pendapatan – LRA pada tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2 Beban	16.364.469.938,00	19.381.845.505,87

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 sebesar Rp16.364.469.938,00 Beban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 15,57 persen atau sebesar Rp3.017.375.567,87 dari jumlah Beban tahun 2024 sebesar Rp19.381.845.505,87. Beban - LO sendiri pada tahun 2025 terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	15.276.853.357,00	18.359.717.126,87

Beban operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Berikut ini rincian Beban operasi pada tahun 2025 serta 2024 sebagai perbandingan :

Tabel 5.24
Rincian Beban Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
			Rp	%
Beban Pegawai	10.648.255.772,00	10.408.809.917,00	239.445.855,00	2,30

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
			Rp	%
Beban Barang dan Jasa	4.628.597.585,00	7.950.907.209,87	(3.322.309.624,87)	(41,79)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	606.859.346,00	724.880.034,00	(118.020.688,00)	(16,28)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	328.578.704,00	261.231.314,00	67.347.390,00	25,78
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	36.017.031,00	36.017.031,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	116.161.500,00	0,00	116.161.500,00	0,00
Jumlah	16.364.469.938,00	19.381.845.505,87	3.017.375.567,87	15,57

Tabel di atas menunjukkan bahwa Beban Pegawai mengalami kenaikan senilai 2,30 persen atau sebesar Rp239.445.885,00 dari nilai Beban Pegawai tahun 2024. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan senilai 2,30 persen atau sebesar Rp3.322.309.624,87 dibandingkan dengan nilai tahun 2024. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tidak mengalami Kenaikan sebesar Rp3.827.045,10 atau 41,79 persen jika dibandingkan dengan nilai tahun 2024, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp67.347.390,00 atau senilai 25,78 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2024, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2024. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 116.161.500,00 jika dibandingkan dengan nilai tahun 2024. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing Beban operasi tahun 2025:

Gambar 5.7
Komposisi Beban Operasi tahun 2025



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa komposisi terbesar berada pada Beban Pegawai berkontribusi sebesar 64,59 persen dari total Beban Operasi. Sedangkan komposisi terkecil berada pada Beban Penyusutan Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar 0,22 persen dari jumlah Beban operasi tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	10.648.255.772,00	10.408.809.917,00

Beban Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp10.648.255.772,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen atau sebesar Rp239.445.855,00 dari nilai Beban Pegawai yang disajikan di tahun 2024 sebesar Rp10.408.809.917,00. Tabel berikut menunjukkan rincian atas Beban Pegawai:

Tabel 5.25
Rincian Beban Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Beban Gaji Pokok PNS	5.097.852.329,00	5.097.852.329,00	0,00	47,87
Beban Gaji Pokok PPPK	694.141.060,00	694.141.060,00	0,00	6,52
Beban Tunjangan Keluarga PNS	443.946.682,00	443.946.682,00	0,00	4,17
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	43.144.442,00	43.144.442,00	0,00	0,41
Beban Tunjangan Jabatan PNS	170.100.000,00	170.100.000,00	0,00	1,60
Beban Tunjangan Fungsional PNS	233.980.000,00	233.980.000,00	0,00	2,20
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	140.025.000,00	140.025.000,00	0,00	1,32
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	40.914.996,00	40.914.996,00	0,00	0,38
Beban Tunjangan Beras PNS	242.679.420,00	242.679.420,00	0,00	2,28
Beban Tunjangan Beras PPPK	34.701.250,00	34.701.250,00	0,00	0,33
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.733.263,00	14.733.263,00	0,00	0,14
Beban Pembulatan Gaji PNS	58.270,00	58.270,00	0,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.060,00	19.060,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.466.708.500,00	1.466.708.500,00	0,00	13,77
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.025.251.500,00	2.025.251.500,00	0,00	19,02
Jumlah	10.648.255.772,00	10.648.255.772,00	0,00	100,00

Dari tabel diatas, tidak terdapat selisih antara kelompok Belanja Pegawai dan Kelompok Beban Pegawai, hal tersebut berarti bahwa seluruh kegiatan operasional yang telah diakui oleh beban pegawai ditahun 2025 telah terbayarkan melalui belanja pegawai sehingga tidak adanya perbedaan diantara beban pegawai serta belanja pegawai. Dapat diketahui juga bahwa Beban Gaji Pokok PNS merupakan Beban dengan komposisi terbesar pada kelompok Beban Pegawai yaitu sebesar Rp5.097.852.329,00 atau 47,87 persen dari total Beban Pegawai sebesar Rp10.648.255.772,00. Sementara Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS menjadi komposisi terkecil dengan hanya berkontribusi sebesar Rp14.733.263,00 atau 0,14 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	4.628.597.585,00	7.950.907.209,87

Beban Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp4.628.597.585,00 Beban Barang dan Jasa di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 41,79 persen atau sebesar Rp3.322.309.624,87 dari nilai Beban Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp7.950.907.209,87. Tabel berikut menunjukkan rincian dan komposisi Beban Barang dan Jasa tahun 2025 :

Tabel 5.26
Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Barang Pakai Habis	955.902.945,00	955.875.564,00	(27.381,00)	20,65
Jasa Kantor	2.213.320.817,00	2.213.320.817,00	0,00	47,82

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Iuran Jaminan/Asuransi	11.808.000,00	11.808.000,00	0,00	0,26
Sewa Peralatan dan Mesin	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	1,38
Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Konsultansi Konstruksi	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	2,14
Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.962.751,00	213.962.751,00	0,00	4,62
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.770.000,00	29.770.000,00	0,00	0,64
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	967.060.453,00	967.060.453,00	0,00	20,89
Penghargaan atas suatu prestasi	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	1,60
Jumlah	4.628.624.966,00	4.628.597.585,00	(27.381,00)	100,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat selisih antara kelompok Belanja Barang Dan Jasa dan Kelompok Beban Barang dan Jasa sebesar Rp27.381,00, nilai tersebut disebabkan karena kenaikan nilai persediaan diakhir periode sebesar 2025 sebesar Rp27.381,00. Kemudian untuk komposisi, Beban Jasa Kantor merupakan beban dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 47,82 persen sementara Beban Sewa Gedung dan Bangunan menjadi komposisi terkecil yaitu 0,00 persen karena tidak terealisasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Beban Penyusutan Aset Tetap	1.087.616.581,00	1.022.128.379,00

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp1.087.616.581,00 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp65.488.202,00 atau senilai 6,41 persen dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, berikut rincian Beban penyusutan.

Tabel 5.27
Rincian dan Perbandingan Beban Penyusutan Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	606.859.346,00	724.880.034,00	(118.020.688,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	328.578.704,00	261.231.314,00	67.347.390,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	36.017.031,00	36.017.031,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	116.161.500,00	0,00	116.161.500,00
Jumlah	1.087.616.581,00	1.022.128.379,00	65.488.202,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00

Beban penyusutan Aset Lain-Lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang berasal dari Beban penyusutan Aset Lain-lain, nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan nilai tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan Beban - LO. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami defisit - LO Sebesar Rp16.363.469.938,00 Nilai tersebut berasal dari total pendapatan - LO sebesar Rp1.000.000,00 dikurangi total Beban - LO sebesar Rp16.364.469.938,00 Terjadi penurunan nilai defisit sebesar 15,57 persen atau sebesar Rp3.017.375.567,87 dibandingkan dengan nilai defisit tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp18.890.632.755,87.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025. Jumlah ekuitas akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp32.686.870.954,36. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2024 (saldo akhir per 31 Desember 2024) dikurangi defisit - LO Tahun 2025 kemudian dikurangi koreksi ekuitas lainnya dan ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2025:

Tabel 5.28
Rincian Laporan Ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	33.613.058.646,46	29.545.661.666,84
Surplus/Defisit – LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(26.898.667,00)	(498.130.716,38)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	15.586.028.646,00	23.456.160.451,87
Ekuitas Akhir	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	33.613.058.646,46	29.545.661.666,84

Ekuitas awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.613.058.646,46. Ekuitas awal tahun 2025 mengalami Kenaikan sebesar 13,77 persen atau sebesar Rp4.067.396.979,62 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.545.661.666,84.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan selisih antara pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami defisit - LO sebesar Rp16.363.469.938,00, nilai tersebut mengalami penurunan defisit sebesar 12,73 persen atau sebesar Rp2.527.162.817,87 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp18.890.632.755,87. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan	(26.898.667,00)	(498.130.716,38)

Dampak Kumulatif Perubahan merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2025. Dampak Kumulatif Perubahan berupa Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya, Dampak Kumulatif Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 memiliki dampak kumulatif perubahan sebesar Rp26.898.668,00. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 355.070.549,38 atau 71,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya dimana terdapat Dampak Kumulatif Perubahan sebesar Rp498.130.716,38. Berikut rincian mutasinya.

Tabel 5.29
Rincian Mutasi Koreksi Ekuitas 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Mutasi Bertambah	
Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	0,00
Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00
Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah Mutasi Bertambah	0,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	0,00
Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	(26.898.667,00)
Jumlah Mutasi Berkurang	(26.898.667,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(26.898.667,00)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	15.586.028.646,00	23.456.160.451,87

Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.586.028.646,00. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan tahun ini mengalami penurunan sebesar 33,54 persen atau sebesar Rp7.870.131.805,87 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp23.456.160.451,87

5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

ANALISI VERTIKAL

Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (15.586.028.646,00)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (15.586.028.646,00)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 1.000.000,00$$

$$\text{Total Belanja} = 15.587.028.646,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\underline{0,00}}$$

Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 32.808.718.687,46$$

$$\text{Aset} = 32.808.718.687,46$$

$$\text{Total Kewajiban} = 0,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 32.808.718.687,46$$

$$\text{Selisih} = \underline{\underline{0,00}}$$

2. Kas

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = \underline{\underline{0,00}}$$

Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Surplus/Defisit LO} &= \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} \\ &= (16.363.469.938,00) \end{aligned}$$

$$\text{Surplus/Defisit LO} = (16.363.469.938,00)$$

Total Pendapatan (LO)	=	1.000.000,00
Total Beban (LO)	=	16.364.469.938,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Akhir

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 32.808.718.687,46$$

Ekuitas Akhir	=	32.808.718.687,46
Ekuitas Awal	=	33.613.058.646,46
Surlus (Defisit) LO	=	(16.363.469.938,00)
Koreksi Ekuitas	=	(26.898.667,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	15.586.028.646,00
Selisih		0,00

Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = \mathbf{310.147.908,00}$$

Belanja Modal	=	310.147.908,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	29.552.612.941,36
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	30.478.828.014,46
Selisih		(616.067.165,10)

Penjelasan

Selisih berasal dari penambahan nilai aset tetap dari mutasi penambahan hibah sebesar Rp310.147.908,00 dan Koreksi Ekuitas untuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sebesar Rp1.236.362.981,10

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	33.613.058.646,46
--	---	--------------------------

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	33.613.058.646,46
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	33.613.058.646,46
Selisih		0,00

2. Surplus (Difisit) – LO

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(16.363.469.938,00)
Surplus/Defisit pada LO	=	(16.363.469.938,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(16.363.469.938,00)
Selisih		0,00

Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Persediaan (LO)

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	955.875.564,00
---	---	-----------------------

Beban Persediaan (LO)	=	955.875.564,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	955.902.945,00
Persediaan Awal Tahun	=	2.625.246,00
Persediaan Akhir Tahun	=	2.652.627,00
Selisih		0,00

2. Beban Penyusutan (LO)

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	1.087.616.581,00
--	---	------------------

Beban Penyusutan (LO)	=	1.087.616.581,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(16.992.179.318,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(15.877.664.070,00)
Selisih		(26.898.667,00)

Penjelasan

Selisih diakibatkan adanya koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp26,898,667,00

BAB VI

PENUTUP

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2025 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 25 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Sulawesi Tengah



MUHAMMAD AM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	9.200.000,00	1.000.000,00	10,87	1.750.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.200.000,00	1.000.000,00	10,87	1.750.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.200.000,00	1.000.000,00	23,81	1.750.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.200.000,00	1.000.000,00	10,87	1.750.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	9.200.000,00	1.000.000,00	10,87	1.750.000,00
5	BELANJA DAERAH	18.291.908.921,52	15.587.028.646,00	85,21	23.457.910.451,87
5.1	BELANJA OPERASI	17.981.123.721,52	15.276.880.738,00	84,96	18.359.736.872,87
5.1.01	Belanja Pegawai	13.140.121.582,52	10.648.255.772,00	81,04	10.408.809.917,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.841.002.139,00	4.628.624.966,00	95,61	7.950.926.955,87
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.981.123.721,52	15.276.880.738,00	84,96	18.359.736.872,87
5.2	BELANJA MODAL	310.785.200,00	310.147.908,00	99,79	5.098.173.579,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.554.000,00	193.986.408,00	99,71	1.077.880.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		3.673.493.579,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.231.200,00	116.161.500,00	99,94	346.800.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	310.785.200,00	310.147.908,00	99,79	5.098.173.579,00
	JUMLAH BELANJA	18.291.908.921,52	15.587.028.646,00	85,21	23.457.910.451,87
	SURPLUS/DEFISIT	(18.282.708.921,52)	(15.586.028.646,00)	85,25	(23.456.160.451,87)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(18.282.708.921,52)	(15.586.028.646,00)	85,25	(23.456.160.451,87)

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025
PLT. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


W. M. IDRIS KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	1.000.000,00	491.212.750,00	(490.212.750,00)	(99,80)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.000.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(42,86)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.000.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(42,86)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.000.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(42,86)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	489.462.750,00	(489.462.750,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0	489.462.750,00	(489.462.750,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	489.462.750,00	(489.462.750,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000,00	491.212.750,00	(490.212.750,00)	(99,80)
8	BEBAN	16.364.469.938,00	19.381.845.505,87	(3.017.375.567,87)	(15,57)
8.1	BEBAN OPERASI	15.276.853.357,00	18.359.717.126,87	(3.082.863.769,87)	(16,79)
8.1.01	Beban Pegawai	10.648.255.772,00	10.408.809.917,00	239.445.855,00	2,30
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.628.597.585,00	7.950.907.209,87	(3.322.309.624,87)	(41,79)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	15.276.853.357,00	18.359.717.126,87	(3.082.863.769,87)	(16,79)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.087.616.581,00	1.022.128.379,00	65.488.202,00	6,41
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	606.859.346,00	724.880.034,00	(118.020.688,00)	(16,28)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	328.578.704,00	261.231.314,00	67.347.390,00	25,78
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	36.017.031,00	36.017.031,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	116.161.500,00	0,00	116.161.500,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.087.616.581,00	1.022.128.379,00	65.488.202,00	6,41
	JUMLAH BEBAN	16.364.469.938,00	19.381.845.505,87	(3.017.375.567,87)	(15,57)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)	2.527.162.817,87	(13,38)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)	2.527.162.817,87	(13,38)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)	2.527.162.817,87	(13,38)

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

PLT. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	33.613.058.646,46	29.545.661.666,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)
RK PPKD	15.586.028.646,00	23.456.160.451,87
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(26.898.667,00)	(498.130.716,38)
EKUITAS AKHIR	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah



MUHAMMAD IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
1.1	ASET LANCAR	2.652.627,00	2.625.246,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	2.652.627,00	2.625.246,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.652.627,00	2.625.246,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	29.674.460.674,46	30.478.828.014,46
1.3.01	Tanah	1.852.450.000,00	1.852.450.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.401.973.854,00	11.207.987.446,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	21.244.720.344,62	21.244.720.344,62
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	682.270.100,00	682.270.100,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	11.385.291.693,84	11.269.130.193,84
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.934.000,00	99.934.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(16.992.179.318,00)	(15.877.664.070,00)
	JUMLAH ASET TETAP	29.674.460.674,46	30.478.828.014,46
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00
1.5.04	Aset Lain-lain	4.398.121.900,00	5.444.721.900,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.266.516.514,00)	(2.313.116.514,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
3.1.01	Ekuitas	49.172.188.625,46	52.503.691.402,33
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(16.363.469.938,00)	(18.890.632.755,87)
	JUMLAH EKUITAS	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

**PLT. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MUN. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
1.1	ASET LANCAR	2.652.627,00	2.625.246,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	2.652.627,00	2.625.246,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.652.627,00	2.625.246,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	29.674.460.674,46	30.478.828.014,46
1.3.01	Tanah	1.852.450.000,00	1.852.450.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.401.973.854,00	11.207.987.446,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	21.244.720.344,62	21.244.720.344,62
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	682.270.100,00	682.270.100,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	11.385.291.693,84	11.269.130.193,84
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.934.000,00	99.934.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(16.992.179.318,00)	(15.877.664.070,00)
	JUMLAH ASET TETAP	29.674.460.674,46	30.478.828.014,46
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00
1.5.04	Aset Lain-lain	4.398.121.900,00	5.444.721.900,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.266.516.514,00)	(2.313.116.514,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	3.131.605.386,00	3.131.605.386,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
3.1.01	Ekuitas	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
	JUMLAH EKUITAS	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32.808.718.687,46	33.613.058.646,46

Provinsi Sulawesi Tengah, 31 Desember 2025

PLT. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MUHAMMAD KHALID S.Sos., M.A.P
NIP.197312311994031010